



## Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan, Anggaran Pendidikan dan Pariwisata Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Edward Zubir<sup>1</sup>, Darwin Hartono<sup>2</sup>, Anton Robiansyah<sup>3</sup>, Selly Anastassia Amellia Kharis<sup>4</sup>

<sup>1, 4</sup>Fakultas Saint Teknologi Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indraprasta PGRI

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka

Email: <sup>1</sup>[edo@ecampus.ut.ac.id](mailto:edo@ecampus.ut.ac.id); <sup>2</sup>[darwinhartono.state@gmail.com](mailto:darwinhartono.state@gmail.com);

<sup>3</sup>[anton.robiansyah@ecampus.ut.ac.id](mailto:anton.robiansyah@ecampus.ut.ac.id); [selly@ecampus.ut.ac.id](mailto:selly@ecampus.ut.ac.id)

### How to Cite :

Zubir, E., Hartono, D., Robiansyah, A., Kharis, S.A.A., (2023). Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan, Anggaran Pendidikan dan Pariwisata Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2).doi:<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>

### ARTICLE HISTORY

Received [05 Juni 2023]

Revised [25 juni 2023]

Accepted [28 Juli 2023]

### KEYWORDS

Health Budget, Education Budget, Tourism, Poverty

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh realisasi anggaran kesehatan, realisasi anggaran pendidikan dan pariwisata terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2007 hingga 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan nilai konstanta sebesar -110,441 artinya jika variabel bebas realisasi anggaran kesehatan, realisasi anggaran pendidikan dan pariwisata tetap atau tidak berubah, dengan asumsi ceteris paribus maka kemiskinan akan menurun 110,441 satuan. Realisasi anggaran kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 1,946. Realisasi anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 1,548. Pariwisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 1,304. Hasil Adjusted R Square sebesar 0,843 atau 84,3 persen, dengan demikian variabel realisasi anggaran kesehatan, realisasi anggaran pendidikan dan pariwisata mampu mendeterminasi variabel kemiskinan sebesar 84,3 persen. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung sebesar -17,150 lebih besar dari nilai F tabel dengan df (0,05;3;11) sebesar 3,587 dengan nilai probabilitas 0,002. Dengan demikian, realisasi anggaran kesehatan, realisasi anggaran pendidikan dan pariwisata berpengaruh negatif signifikan secara bersama-sama terhadap kemiskinan.

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze the effect of the realization of the health budget, the realization of the education and tourism budget on poverty in West Java in 2007-2021. This type of research is associative research with a quantitative approach. The analytical method used is multiple regression analysis. The results showed a constant value of -110.441, meaning that if the independent variables were the realization of the health budget, the realization of the education and tourism budget remained unchanged, assuming ceteris paribus then poverty would decrease by 110.441 units. Realization of the health budget has a negative and significant effect on poverty with a coefficient of 1.946. Realization of the education budget has a negative and significant effect on*

*poverty with a coefficient of 1.548. Tourism has a negative and significant effect on poverty with a coefficient of 1.304. The Adjusted R Square result is 0.843 or 84.3 percent, thus the realization of the health budget variable, the realization of the education and tourism budget is able to determine the poverty variable by 84.3 percent. The results of the F test show that the calculated F is -17.150 greater than the F table value with df (0.05;3;11) of 3.587 with a probability value of 0.002. Thus, the realization of the health budget, the realization of the education and tourism budgets have a significant negative effect on poverty together.*

## PENDAHULUAN

Selama dekade 1950an hingga awal dekade 1960an, paradigma pembangunan ekonomi dikhususkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang tidak mempercayai mekanisme pasar dan adanya kegagalan pasar (market failure), sementara itu pembangunan di bidang lainnya diarahkan untuk menunjang keberhasilan paradigma pembangunan ekonomi tersebut. Pada kenyataannya paradigma pembangunan ekonomi yang keberhasilannya tercermin pada kenaikan angka-angka Gross Domestic Product atau Gross National Product setiap tahunnya belum mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan (Hartono, 2020). Memasuki dekade 1960an akhir hingga awal dekade 1970an, muncullah paradigma pembangunan ekonomi baru dengan tidak menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tinggi saja tetapi bagaimana mengurangi kemiskinan (Budiarti & Hartono, 2023).

Permasalahan kemiskinan telah menjadi isu global dan masuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) untuk segera diatasi. Kemiskinan dapat dimaknai sebagai situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan dapat memberikan dampak yang cukup serius dikarenakan permasalahan ini sangatlah kompleks, bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Hal tersebut menjadikan kualitas hidup hidup masyarakat pada akhirnya lebih buruk dari sebelumnya. Kemiskinan merupakan deprivasi dalam kesejahteraan dan merupakan fenomena multidimensi yang dipandang dari beberapa sisi (Ngarifun & Hartono, 2022). Pertama, dari pandangan konvensional yaitu kemiskinan dari sisi moneter yaitu kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika berada di bawah batasan tersebut, maka dianggap miskin. Kedua, pandangan kemiskinan tidak hanya sebatas ukuran moneter, tetapi juga mencakup miskin nutrisi yang diukur dengan memeriksa apakah pertumbuhan anak-anak terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan, misalnya dengan menggunakan indikator angka buta huruf. Ketiga, pandangan yang lebih luas yaitu jika masyarakat kekurangan kemampuan dasar, sehingga pendapatan dan pendidikan yang dimiliki tidak memadai, kesehatan yang buruk, ketidakamanan, kepercayaan diri yang rendah, rasa ketidakberdayaan dan tidak adanya hak bebas berpendapat.

Munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 dapat dimaknai bahwa setiap daerah diwajibkan memiliki pos anggaran belanja menurut fungsi yang dipergunakan untuk meningkatkan kemajuan daerah (Hartono, 2022). Dengan adanya belanja fungsi pendidikan maka akan terjadi peningkatan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang berdampak kepada peningkatan pendidikan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka pengetahuan dan keahlian ikut meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya masyarakat akan memperoleh kesejahteraan lebih baik yang diperlihatkan melalui peningkatan kemampuan, pendapatan maupun konsumsinya. Sedangkan dengan adanya belanja fungsi kesehatan maka akan terdapat fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Derajat kesehatan yang tinggi menghasilkan kualitas

manusia lebih baik dengan tingkat mental maju dan kemampuan berproduktivitas lebih baik. Dengan begitu maka masyarakat menjadi sehat sejahtera dan memiliki kemampuan keluar dari kemiskinan.

Pariwisata juga memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan. Merujuk dari beberapa fakta dari UNWTO (2018) menyatakan pariwisata dapat mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan pekerjaan, penerimaan devisa, dan pengembangan daerah. Hal itu terbukti bahwa pariwisata sebagai penyumbang PDB dunia pada tahun 2017 sebesar 10 persen. Pariwisata mampu menyumbang 1 dari setiap 10 pekerjaan di seluruh dunia, dan penyumbang 30 persen ekspor dunia tertinggi yang menghasilkan pendapatan ekspor. Selain itu, pariwisata merupakan sektor yang berpusat pada penggunaan sumber daya manusia sebagai penggerak sehingga dapat memberikan lapangan kerja baru dan menghindarkan dari permasalahan kemiskinan. Pariwisata juga dapat memberikan dampak terhadap pengembangan daerah lokal yang nantinya mampu mengentaskan kemiskinan daerah.

## LANDASAN TEORI

### Kemiskinan

Ravallion (dalam Kuncoro, 2006) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai uang untuk berobat dan pada umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit sehingga kemiskinan merupakan ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas. Sharp dalam Kuncoro (2006) menjelaskan penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi ialah:

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah;
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, dan karena keturunan;
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan Nurse. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya berputar terus menerus. Dengan memiliki makna yang luas, kemiskinan terbagi atas dua macam ukuran kemiskinan yang umumnya digunakan. Pertama, kemiskinan absolut yaitu kondisi dimana tingkat pendapatan minimum tidak dapat mencapai kebutuhan minimum seperti makanan, pakaian, perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kedua, kemiskinan relatif yaitu kondisi dimana pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Konsep kemiskinan relatif lebih bersifat dinamis sehingga kemiskinan selalu ada. Untuk mengukur kemiskinan, BPS Indonesia menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dihitung garis kemiskinan konsumsi dan selanjutnya dapat dihitung *Head Count Index* yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan konsumsi. Dengan demikian kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

### **Anggaran Kesehatan**

Belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 33 yang termasuk dalam klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara dalam fungsi meningkatkan kesehatan rakyat. Adanya belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan menunjukkan adanya keberpihakkan pemerintah melalui pemerintah daerah terhadap kesehatan hingga ke daerah. Dalam Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar (azasi) manusia, sehingga pemerintah pusat maupun daerah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasilitasi kesehatan kepada rakyatnya.

### **Anggaran Pendidikan**

Belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 33 yang termasuk dalam klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara dalam fungsi penyelenggaraan pendidikan. Adanya belanja daerah fungsi pendidikan menunjukkan adanya keberpihakkan pemerintah melalui pemerintah daerah terhadap pendidikan hingga ke daerah. Adanya belanja tersebut menjadikan masyarakat dapat mengakses dan ikut menikmati pendidikan dalam jangka panjang sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja dan mensejahterahkan dirinya sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah maupun negara.

### **Pariwisata**

Pariwisata merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk tinggal diluar tempat tinggalnya sendiri untuk sementara waktu, tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk tujuan wisata atau tujuan lainnya yang tidak bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan atau gaji ditempat yang dikunjungi. Terdapat dua elemen utama dalam pariwisata diantaranya adalah elemen wisatawan yang merupakan aktor dari sistem pariwisata dan elemen geografi yang memiliki tiga komposisi yaitu Traveler Generating Region mengenai mencakup asal wisatawan, pasar, informasi pariwisata, dan transaksi perjalanan wisata. Kemudian Tourist Destination Region mengenai tujuan perjalanan wisata dan terakhir yaitu Transit Route Region mengenai tempat sementara sebelum mencapai daerah tujuan wisata. Permintaan pariwisata terdiri dari berbagai macam unsur yang berguna bagi para wisatawan. Permintaan dalam pariwisata bisa terjadi saat periode perjalanan dan sebelum memulai perjalanan. Adapun faktor yang mampu mempengaruhi permintaan pariwisata antara lain pendapatan seseorang, harga ditawarkan, kualitas produk, hubungan politik yang terjadi, hubungan ekonomi, serta hubungan sosial budaya pun menjadi faktor. Selain itu kondisi cuaca, adanya hari libur, peraturan pemerinta, serta adanya foreign exchange restriction dapat mempengaruhi permintaan pariwisata. Adapun pengaruh ke aspek ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pariwisata yaitu mampu merangsang investasi, sebagai penghasil devisa, mampu merangsang tumbuhnya industri ekonomi lainnya, mampu berkontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan, dan mampu menyebabkan skala ekonomi positif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011), penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab-akibat, salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Penelitian asosiatif menggunakan teknik analisis kuantitatif atau statistik. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu

jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Adapun sumber data diperoleh dari data resmi dari instansi terkait, diantaranya berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang digunakan diantaranya ialah:

- a. Perkembangan Kemiskinan Provinsi Provinsi Jawa Barat tahun 2007 hingga 2021;
- b. Realisasi Anggaran Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 hingga 2021;
- c. Realisasi Anggaran Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 hingga 2021;
- d. Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 hingga 2021.

Dengan metode analisis tersebut maka persamaan fungsi liniernya sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 KSHTN_{it} + \beta_2 PNDKN_{it} + \beta_3 PRWSTA_{it} + e$$

dimana:

- Y<sub>it</sub> = perkembangan kemiskinan Provinsi Jawa Barat
- α = konstanta kemiskinan Provinsi Jawa Barat
- β<sub>1</sub> = koefisien regresi realisasi anggaran kesehatan Provinsi Jawa Barat
- KSHTN<sub>it</sub> = realisasi anggaran kesehatan Provinsi Jawa Barat
- β<sub>2</sub> = koefisien regresi realisasi anggaran pendidikan Provinsi Jawa Barat
- PNDKN<sub>it</sub> = realisasi anggaran pendidikan Provinsi Jawa Barat
- β<sub>3</sub> = koefisien regresi jumlah kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Barat
- PRWSTA<sub>it</sub> = jumlah kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Barat
- e<sub>it</sub> = variabel pengganggu

$$Y = a + bX \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- a : Konstanta
- b : Koefisien Korelasi
- Y : Nilai Perkiraan (Proyeksi)
- X : Periode Waktu

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil regresi berganda Kemiskinan Provinsi Jawa Barat tahun 2007 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Regresi Berganda Kemiskinan Provinsi Jawa Barat**

Variabel	Koefisien Regresi	t-Statistik	Sig.
Konstanta	-110,441	3,288	0,002
KSHTN	-1,946	-5,022	0,004
PNDKN	-1,548	-3,636	0,004
PRWSTA	-1.304	-2,871	0,003
Adj R-Square	0,843		
F-Statistik	-17,150		
Sig F-Statistik	0,002		

Sumber: Data diolah (2023).

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel diatas maka persamaan regresi adalah sebagai berikut  $Y = -110,441 - 1,946 \text{ KSHTN} - 1,548 \text{ PNDKN} - 1,304 \text{ it}$

Dari hasil Tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar -110,441. Maksudnya adalah jika realisasi anggaran kesehatan, realisasi anggaran pendidikan dan pariwisata tetap atau tidak berubah dengan asumsi *ceteris paribus* maka kemiskinan akan menurun 110,441 satuan. Terlihat juga pada tabel diatas bahwa ketiga variabel independen realisasi anggaran kesehatan, realisasi anggaran pendidikan dan pariwisata memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Realisasi anggaran kesehatan memiliki pengaruh negatif atau tidak searah dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar 1,946 yang bermakna apabila realisasi anggaran kesehatan mengalami kenaikan satu milyar dengan asumsi *ceteris paribus* maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1,946 satuan. Begitu juga variabel realisasi anggaran pendidikan juga memiliki pengaruh negatif atau tidak searah dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar 1,548 yang bermakna apabila realisasi anggaran pendidikan mengalami kenaikan satu milyar dengan asumsi *ceteris paribus*, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1,548 satuan. Terakhir, variabel pariwisata juga memiliki pengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar 1,304 yang bermakna apabila jumlah wisatawan mengalami kenaikan satu juta kunjungan dengan asumsi *ceteris paribus*, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1,304 satuan.

Berdasarkan Tabel 1 juga menunjukkan hasil Adjusted R Square sebesar 0,843 atau 84,3 persen. Hal ini berarti menunjukkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu realisasi anggaran kesehatan, realisasi anggaran pendidikan dan Pendidikan mampu mendeterminasi variabel dependen kemiskinan sebesar 84,3 persen. Sedangkan sisanya yaitu 15,7 persen dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan Tabel 1 juga menunjukkan hasil F hitung sebesar -17,150 lebih besar daripada nilai F tabel dengan df (0,05;3;11) sebesar -3,587 dengan nilai probabilitas 0,002. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen realisasi anggaran kesehatan, realisasi anggaran pendidikan dan pariwisata berpengaruh negatif signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai t hitung variabel realisasi anggaran kesehatan sebesar -5,022 lebih besar dari pada t tabel (0,05;12) sebesar -2,179 dengan nilai probabilitas sebesar 0,004 lebih kecil dari ( $\alpha = 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel realisasi anggaran kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, nilai t hitung variabel realisasi anggaran pendidikan sebesar -3,636 lebih besar dari pada t tabel (0,05;12) sebesar -2,179 dengan nilai probabilitas sebesar 0,004 lebih kecil dari ( $\alpha = 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel realisasi anggaran pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Terakhir, nilai t hitung variabel pariwisata sebesar -2,871 lebih besar dari t table (0,05;12) sebesar -2,179 dengan nilai probabilitas sebesar 0,003 lebih kecil dari ( $\alpha = 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pariwisata berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel realisasi anggaran kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardhana & Kharisma, 2019), (Fani Wulandari, 2021) dan (Hartono, 2023). Kesehatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya realisasi anggaran kesehatan maka terdapat fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Derajat kesehatan yang tinggi menghasilkan kualitas manusia lebih baik dengan tingkat mental maju dan kemampuan berproduktivitas yang tinggi. Dengan hal tersebut masyarakat menjadi lebih sehat dan memperbesar mendapatkan pekerjaan layak sehingga dapat terhindar dari permasalahan kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel realisasi anggaran pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardhana & Kharisma, 2019), (Fani Wulandari, 2021) dan (Hartono, 2023) Realisasi

anggaran pendidikan berdampak pada peningkatan fasilitas dan pelayanan pendidikan agar mencapai pendidikan lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan maka pengetahuan dan keahlian ikut meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya dengan produktivitas tinggi memperoleh kesejahteraan lebih baik yang diperlihatkan melalui peningkatan kemampuan, pendapatan maupun konsumsinya sehingga keluar dari kemiskinan. Realisasi anggaran pendidikan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Adanya anggaran pendidikan maka memperbesar akses terhadap pendidikan sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan yang diterima masyarakat dengan demikian memperbesar kemungkinan mendapat pekerjaan dan pengupahan yang lebih layak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pariwisata berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bayanilah, 2019), (Gunadi, 2019), dan (Mulyana, 2021). Adanya wisatawan memiliki pengaruh untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dikarenakan kedatangan wisatawan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan peluang bekerja untuk meningkatkan penghasilan. Sektor pariwisata memiliki dampak langsung terhadap perekonomian antara lain terhadap penciptaan lapangan kerja, retribusi pendapatan, dan penguatan neraca pembayaran. Konsumsi wisatawan mancanegara sebagai bentuk alternatif dari ekspor dengan berkontribusi berupa penerimaan devisa. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang modal dan menghasilkan barang-barang dan jasa, yang pada akhirnya menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja dan retribusi pendapatan yang berdampak kepada pengurangan kemiskinan masyarakat sekitar tempat wisata. Kemudian adanya efek imitasi atau imitation effect produk barang oleh komunitas masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan lapangan kerja baru di sekitar tempat wisata sehingga dapat memperbaiki perekonomian sekitar tempat wisata dan mengurangi tingkat kemiskinan..

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

1. Realisasi anggaran kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2021. Dengan adanya realisasi anggaran kesehatan maka terdapat fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Derajat kesehatan yang tinggi menghasilkan kualitas manusia lebih baik dengan tingkat mental maju dan kemampuan berproduktivitas yang tinggi. Dengan hal tersebut masyarakat menjadi lebih sehat untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik dan terhindar dari permasalahan kemiskinan.
2. Realisasi anggaran pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2021. Realisasi anggaran pendidikan berdampak pada peningkatan fasilitas dan pelayanan pendidikan agar mencapai pendidikan lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan maka pengetahuan dan keahlian ikut meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya dengan produktivitas tinggi memperoleh kesejahteraan lebih baik yang diperlihatkan melalui peningkatan kemampuan, pendapatan maupun konsumsinya sehingga keluar dari kemiskinan.
3. Pariwisata berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2021. Adanya wisatawan memiliki pengaruh untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dikarenakan kedatangan wisatawan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan peluang bekerja untuk meningkatkan penghasilan. Sektor pariwisata memiliki dampak langsung terhadap perekonomian antara lain terhadap penciptaan lapangan kerja, retribusi pendapatan, dan penguatan neraca pembayaran. Konsumsi wisatawan mancanegara sebagai bentuk alternatif dari ekspor dengan berkontribusi berupa penerimaan devisa. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang modal dan menghasilkan

barang-barang dan jasa, yang pada akhirnya menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja dan retribusi pendapatan yang berdampak kepada pengurangan kemiskinan masyarakat sekitar tempat wisata

### DAFTAR PUSTAKA

- Bayanilah, A. N. (2019). Pengaruh Kinerja Pariwisata Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Negara – Negara Asean Terpilih Tahun 2002 - 2017. Skripsi, 1–88.
- Budiarti, P., & Hartono, D. (2023). The Effect of Economic Growth and Investment on Poverty West Java Province in 2004-2019. *Literatus: Literature for Social Impact and Cultural Studies*, 5(1), 1–6.
- Fani Wulandari. (2021). Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Barat. In *Frontiers in Neuroscience* (Vol. 14, Issue 1).
- Gunadi, N. P. B. E. P. (2019). Pengaruh sektor pariwisata terhadap kemiskinan di provinsi bali. *Universitas Brawijaya*, 1–14.
- Hartono, D. (2020). Factors That Influence Income Inequality Distribution in Central Java Province. *Literatus Journal*, 2(2), 193–198.
- Hartono, D. (2022). Determinan Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio E-Kons*, 14(2), 155–164.
- Hartono, D. (2023). Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Penanggulan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Mirai Manajemen*, 8(1), 405–411.
- Kemendagri. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mulyana, I. M. E. (2021). Pengaruh Industri Pariwisata terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Tesis.
- Ngarifun, & Hartono, D. (2022). Upah Dan Harga Konsumen Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2002-2019. *Sosio E-Kons*, 14(3), 240–245.
- Sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro ( PDFDrive ).pdf. In Bandung Alf (p. 143).
- Wardhana, A., & Kharisma, B. (2019). Peran Pengeluaran Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(12), 1343–1366.
- WTO. 2018. *Tourism and Poverty Alleviation*. Madrid: UNWTO.